

Judul : Jumlah penduduk terus meningkat, kebutuhan Dokter ikut naik
Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Jumlah Penduduk Terus Meningkat Kebutuhan Dokter Ikut Naik

Senayan mendukung langkah taktis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama dokter umum dan dokter spesialis.

ANGGOTA Komisi IX DPR Karda Warkana mengatakan, Kemenkes melakukan langkah tepat dengan memetakan ketersediaan tenaga medis di tiap daerah. "Saya kira ini memang sudah bagus untuk program pemenuhan dokter dan dokter spesialis," kata dia dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan perwakilan Kemendikbudristek di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Karda lalu mengacu tabel pemenuhan dokter dan dokter spesialis yang dalam pandangannya sudah memiliki konklusi. "Bisa dilihat dari tabel mengenai kebutuhan di masing-masing daerah atau provinsi. Tabel ini

sangat penting jadi pegangan kita ke depan bahwa provinsi ini butuh sekian dan dipenuhi dalam berapa tahun," katanya.

Dia berharap, tabel kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan di masa mendatang. Apalagi, kebutuhan untuk tenaga dokter dan dokter spesialis ini masih sangat dinamis dan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk di suatu kawasan atau daerah. "Kalau jumlah penduduknya naik, tentu kebutuhan (dokter dan dokter spesialis) juga akan naik," katanya.

Namun dia usul, agar pemenuhan dokter dan dokter spesialis ini juga memperhitungkan pola kebiasaan makanan di dalam penduduk. Hal ini mesti jadi pertimbangan mengingat saat

ini konsumsi masyarakat akan *fast food* atau makanan cepat saji sudah mulai tinggi terutama di perkotaan.

"Sehingga dulu, itu yang namanya penyakit jantung tidak begitu banyak, tapi sekarang sudah mulai," ucapnya.

Dia berharap tabel kebutuhan akan tenaga dokter dan dokter spesialis ini juga bisa sejalan dengan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung alat kesehatan, salah satunya layanan penyakit Kanker, Jantung, Strok dan Urologi (KJSU). Ini penting sebab kebutuhan akan layanan kesehatan meningkat setiap tahunnya.

"Misal kebutuhan di Aceh, saat ini untuk (dokter spesialis) jantung 10, begitu tahun depan kebutuhannya bergerak lagi. Termasuk untuk membaca kebutuhan di Papua," tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut jumlah dokter umum

hingga spesialis di Indonesia masih sedikit. Parlemen menekankan, pemerintah harus memaksimalkan rekrutmen dok-

ter di Tanah Air.

"Dokter di negeri kita kurang banyak, kalau alkes (alat kesehatan) dan obat-obatan ada tapi dokternya sedikit, ya tetap susah. Sebab, mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, kemarin.

Muhaimin juga merespons keinginan Presiden Joko Widodo terkait harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan bisa terjangkau masyarakat. Jika perlu, obat-obatan dapat digratiskan untuk masyarakat Indonesia yang memerlukan.

"Ya, itu bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan), tapi kalau obat-obatan seharusnya gratis dong. Itu kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganya," ucap Cak Imin.

Sementara, Menkes Budi

Gunadi mengatakan, ketujuh jenis dokter spesialis dasar yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis anestesi, spesialis obgyn, spesialis bedah, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik.

Budi Gunadi mengatakan, ketersediaan dokter spesialis dasar telah digagas sejak pemerintahan sebelum-sebelumnya. Termasuk di era Presiden Soeharto. "Memang pada zaman Pak Harto dahulu 30 tahun hingga 40 tahun lalu nggak pernah diubah list spesialisnya. Padahal kondisi epidemiologis di penduduk kita sudah berbeda. Dulunya kan banyaknya ibu dan anak. Makanya spesialis anak harus ada, spesialis obgyn harus ada," ujarnya.

Akan tetapi sekarang, menurut dia, populasi lansia sebagai

contoh di Jakarta lebih banyak ketimbang balita. Situasi itu membutuhkan dokter spesialis dasar yang berbeda pula. ■ KAL